

16% PETANI TAK MILIKI KARTU TANI

Regulasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah

JAKARTA (KR) - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan penyederhanaan regulasi terkait distribusi pupuk bersubsidi agar dapat lebih menjangkau para petani.

Amran mengungkapkan, sebanyak 16 persen petani masih belum memperoleh pupuk bersubsidi karena tidak memiliki Kartu Tani yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan pupuk dari Pemerintah. "Masalahnya sekarang adalah ada petani kita tidak mampu mengakses dengan Kartu Tani. Sehingga kita buat regulasi nantinya petani ini bisa langsung mengakses," kata Amran saat ditemui di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (7/11). Lebih lanjut, Amran menjelaskan hambatan yang dihadapi petani

dalam mengurus Kartu Tani serta memperoleh bantuan pupuk bersubsidi karena sulitnya akses dari tempat tinggal hingga faktor tingkat pendidikan. "Sehingga tidak mampu mengakses, memproses dan seterusnya sehingga dia tidak dapat pupuk. Nah, ini biasa digunakan oleh pihak ketiga, kemudian dia jual lebih tinggi," ujar Amran. Oleh karena itu, terang Amran, Kementerian Pertanian akan mempermudah regulasi distribusi pupuk bersubsidi terutama bagi petani yang belum mempunyai Kartu Tani. Adapun opsi penyederhanaan regulasi yang

diungkapkan Amran, yaitu petani cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau terdaftar dalam kelompok tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. "Kita harus kreatif, kreativitas kita adalah bisa saja (gunakan) KTP, yang penting dia masuk kelompok tani, kemudian kita bisa beri pupuk yang terpenting dia petani, dia berhak dapat pupuk," kata Mentan. Amran menuturkan, saat ini Kementerian Pertanian bersama pihak terkait masih melakukan pembahasan guna mendapatkan solusi atas permasalahan distribusi pupuk bersubsidi. Tahap pembahasan tersebut akan selesai dalam waktu dekat. "Insya Allah kita akan selesaikan. Kita kaji, mungkin satu sampai dua minggu selesai, solusinya ada," ujar Amran. **(Ant/San)-f**

Dukungan Indonesia ke Palestina Tidak Surut

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo menegaskan, dukungan Indonesia ke Palestina tidak surut. "Tetap dukungan kita terhadap Palestina tidak akan surut," ujar Presiden. Demikian disampaikan Presiden Jokowi pada Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 2023 di Grand Ballroom Minhaajurrosyidiin di Jakarta, Selasa (7/11). Jokowi mengingatkan dampak perang antara Ukraina dan Rusia, termasuk perang di Palestina yang berdampak pada banyak negara di dunia. Namun ditegaskan, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Presiden memuji Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Sidang Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat akhir Oktober 2023 yang menyuarakan secara lantang sikap Indonesia terkait Palestina. "Coba Bapak/Ibu lihat Menteri Luar Negeri Bu Retno di Dewan Keamanan PBB paling lantang, paling keras, dan paling menentang," ujarnya. Jokowi mengaku sempat heran dengan sikap keras yang ditunjukkan Menlu Retno dalam forum itu. "Saya juga heran Bu Menlu kita ini orangnya halus, tapi kok di Dewan Keamanan galak banget," kata Jokowi. Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Republik Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Mudi di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Selasa. Staf Khusus Wapres/Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menyebutkan, pertemuan membahas mengenai penguatan kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya di bidang investasi. "Harapan dari Dubes Arab Saudi, dan itu juga disambut oleh Wakil Presiden, tentang pergerakan investasi kedua negara itu mesti segera didorong. Itu adalah sebagai implementasi dari people to people diplomacy," papar Masduki.

Masduki menuturkan, hubungan bilateral kedua negara ini telah berlangsung lama dan terus meningkat. Peningkatan tersebut salah satunya ditandai dengan penandatanganan beberapa nota kesepahaman saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Arab Saudi pada 18 Oktober 2023 yang lalu. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina tidak akan berubah. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam Program Primetime News dengan tema 'Aksi Damai Solidaritas untuk Palestina'. "Sikap Indonesia tidak akan pernah berubah dalam kaitannya dengan masalah Palestina ini, dan tujuan akhir dari hubungan kita kepada bangsa dan rakyat Palestina adalah terciptanya negara yang berdaulat untuk Palestina," ujar Muhadjir. Muhadjir menambahkan, lobi dan diplomasi akan terus dilakukan Pemerintah Indonesia kepada negara-negara Islam yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk dapat turut menekan upaya gencatan senjata. Upaya Pemerintah Indonesia dalam membantu warga Palestina yang terkena dampak dari konflik juga telah dilakukan dengan mengirimkan bantuan sebanyak 51 ton pada 4 November 2023 lalu. Muhadjir menerangkan, bantuan yang dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo tersebut saat ini telah tiba di Mesir dan masih dalam proses antrean di Rafah, pintu masuk menuju ke wilayah Gaza. Muhadjir juga menjelaskan, proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) masih terus diupayakan. Muhadjir mengimbau bagi WNI yang memilih untuk menetap demi tugas kemanusiaan diharap untuk berhati-hati dan tidak mengambil risiko. Sementara WNI yang berhasil dievakuasi masih berada di Mesir untuk menunggu proses penerbangan ke Indonesia. **(Ant/Ati)-d**



HARI WAYANG NASIONAL: Sejumlah anak mementaskan sajian tari 100 wayang saat pembukaan acara Wayang Berbicara IKM Berdaya di Sentra IKM Kreatif Semanggi Harmoni, Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/11/2023). Kegiatan tersebut digelar untuk memperingati Hari Wayang Nasional.

KR- Antara/Maulana Surya

OPTIMALISASI TKD UNTUK PERTANIAN Pembuatan 'Green House' di Merdikorejo Didanai Danais

YOGYA (KR) - Pemanfaatan tanah kas desa (TKD) di Kalurahan Merdikorejo, Tempel, Sleman untuk menanam berbagai macam tanaman seperti timun, cabe dan melon membuahkan hasil yang baik. Bahkan salah seorang petani milenial berhasil memodifikasi buah melon dengan membubuhkan tulisan di kulit buah melon. "Lahan pertanian di Kalurahan Merdikorejo merupakan tanah kas desa yang dimanfaatkan untuk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Kepala Bidang Kembangan, Tatacara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pertanahan, dan Tataruang (KPTR) Paniradya Kaistimewan DIY, Tri Agus Nugroho SSos MSI kepada KR di kantor Paniradya Kaistimewan DIY, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Senin (6/11).



KR-Wawan Isnawan
Tri Agus Nugroho SSos MSI

Merdikorejo, lanjut Tri Agus, salah satu kalurahan yang melaksanakan tertib administrasi pertanahan dalam konteks mengoptimalkan tanah kalurahan guna pengembangan komoditas pertanian. Untuk lebih mengoptimalkan lahan pertanian di Kalurahan Merdikorejo, khususnya tanaman melon, Paniradya Kaistimewan DIY pada tahun 2024 akan membuat *green house* (rumah kaca). "*Green house* tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan hasil melonnya, sehingga harapannya hasil melon akan lebih premium. Kalau hasilnya bagus, harapannya keuntungan akan makin banyak, kesejahteraan juga makin terasa," kata Tri Agus. Untuk membuat *green house*, menurut Tri Agus, tidak ada penambahan lahan, tapi masih mengoptimalkan lahan yang sudah ada. *Green house* dibuat dari bahan aluminium ditutup plastik, kemudian penyiraman dan

kelembapannya diatur, sehingga hasilnya bisa lebih optimal. "Tahun 2024, untuk sementara akan dibangun satu *green house* sebagai uji coba, kalau hasilnya bagus akan kita kembangkan," jelasnya. Dipilihnya Kalurahan Merdikorejo untuk uji coba penanaman melon di rumah kaca,

karena tanaman hortikultura potensial dikembangkan di tanah perbukitan. Apalagi didukung sumber daya manusia untuk pengembangan budidaya pertanian yang lebih modern. "Jadi unsur geografis dan SDM mendukung, begitu pula dengan kesuburan tanahnya," kata Tri Agus. Dikatakan, pembuatan *green house* untuk tanaman melon di Kalurahan Merdikorejo ini merupakan proyek percontohan. "Jika uji coba ini berhasil, punya nilai ekonomis yang lebih tinggi, pasti akan kami replikasikan di daerah lain," katanya. Uji coba tanaman melon di rumah kaca ini nantinya akan dikerjakan oleh kelompok tani di Kalurahan Merdikorejo. Jika berhasil dimungkinkan diujicobakan untuk tanaman lain. "Secara teori pertanian, diharapkan tanaman melon di rumah kaca hasilnya lebih baik, ini yang kemudian akan kita praktikan," katanya. Pembuatan *green house* untuk tanaman melon di Kalurahan Merdikorejo ini menggunakan dana keistime-

waan (danais) sebesar Rp 383 juta, dan dibuat di atas tanah kas desa. Tri Agus menjelaskan, tanah kas desa di Kalurahan Merdikorejo yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian seluas sekitar satu hektare, dan melibatkan 41 KK untuk menggarap enam bidang lahan pertanian. Menurut Tri Agus, Paniradya Kaistimewan DIY akan terus mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah kas desa (TKD) melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pertanahan. Terutama tanah kas desa yang memiliki potensi besar untuk pertanian, tapi belum dioptimalkan dengan baik. BKK Pertanahan, lanjut Tri Agus, ditujukan untuk pemerintah kalurahan yang mengelola secara langsung, sedangkan penerima manfaatnya adalah masyarakat. "Penerima manfaat BKK Pertanahan ini, untuk masyarakat di wilayah kalurahan yang mau dan mampu mengolah tanah tersebut," katanya pula. **(Wan)**



KR-Istimewa
Buah melon yang diberi tulisan pada kulitnya berhasil dikembangkan petani milenial di Kalurahan Merdikorejo.

PADA PEMILU 2024

Panglima Ingatkan 5 Poin Netralitas TNI

JAKARTA (KR) - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menekankan lima poin netralitas prajurit TNI pada pelaksanaan Pemilu 2024, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11). "Pertama, tidak memihak dan memberi dukungan kepada partai politik manapun, beserta pasangan calon (paslon) yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis," kata Yudo. Kedua, kata Panglima, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

Ketiga, lanjut Yudo, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih atau hak individu selaku warga negara Indonesia (WNI) dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih. "Yang keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar, dan mengupload apa pun terhadap hasil quick count (hitung cepat) sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei," tuturnya. Terakhir, tambah Panglima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberi dukungan partai politik, serta pasangan calon yang diusung. "Juga saya berikan buku saku kepada para prajurit sebagai pedoman prajurit individu untuk mereka



KR-Antara/Bayu Pratama S
Laksamana TNI Yudo Margono.

lebih memahami lagi teknis pelaksanaan tentang netralitas TNI tersebut," ucapnya. Yudo pun mengatakan dalam berbagai kesempatan telah menginstruksikan kepada seluruh personel TNI terkait netralitas TNI. "Baik berupa penerbitan regulasi internal tentang ne-

tralitas TNI dalam bentuk Peraturan Panglima TNI dan sosialisasi regulasi internal TNI yang dilaksanakan secara terus-menerus," katanya. Selain Panglima TNI, Raker Komisi I DPR RI itu digelar bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subianto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsel TNI Fadjar Prasetyo. Rapat digelar dengan agenda pembahasan kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024, dan rencana kontingensi dalam pengamanan Pemilu 2024 beserta dukungan anggaran. **(Ant/San)-f**

Kemensos Kaji Ulang BLT Dampak El Nino

JAKARTA (KR) - Kementerian Sosial (Kemensos) mengkaji uang sekitar 18,8 juta keluarga miskin calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengantisipasi dampak El Nino. Hal itu dilakukan agar manfaat BLT tersebut tepat sasaran. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengkaji ulang jumlah keluarga miskin tersebut karena mendapat masukan dalam Rapat Kerja Bersama Anggota Komisi VI-II DPR RI di Jakarta, Selasa (7/11). "Hasil rapat pertama yang masuk dalam daftar penerima ialah 18,8 juta. Tapi saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memfinalisasi jumlah penerima itu," kata Mensos. Dari 18,8 juta calon penerima dana bantuan tersebut adalah masyarakat dalam kategori kelompok miskin dan rentan, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam usulan, para penerima akan mendapat BLT senilai Rp 200.000 perbulan pada November-Desember 2023. Menurut Mensos, pemberian BLT tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli keluarga miskin yang terdampak El Nino, misalnya mereka yang menjadi korban kekeringan ekstrem. Namun, Komisi VIII DPR RI meminta Kemensos mempertimbangkan apakah masyarakat yang terdampak El Nino itu termasuk kategori miskin atau rentan. Pasalnya, Komisi VIII menemukan dampak El Nino tidak hanya dirasakan masyarakat miskin, namun juga menimpa golongan berpenghasilan menengah hingga membuat mereka kehilangan mata pencaharian. "Makanya secara persis terkait bantuan tunai El Nino ini belum bisa kami pastikan," imbuh Risma. **(Ant/Ati)-d**

DUGAAN PELECEHAN MISS UNIVERSE Korban Berharap Ada Tersangka Baru

JAKARTA (KR) - Kuasa hukum korban pelecehan pada ajang Miss Universe Indonesia, Mellisa Angraini bersama enam korban dan empat saksi hadir di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Korban berharap ada tersangka baru dalam kasus pelecehan di kontes kecantikan tersebut setelah dirinya bersama sejumlah saksi kembali memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Selasa. "Kami lihat dari penggalian lebih lanjut ada penetapan tersangka yang baru karena tidak bisa dipungkiri pelecehan Miss Universe ini dilakukan saat karantina acara resmi," kata Mellisa, Selasa (7/11). Karena itu, pihaknya cukup heran hingga saat ini dari korporasi atau pihak perusahaan sama sekali tidak ditetapkan sebagai tersangka. "Kami berharap yang pertama Poppy Capella karena dia adalah orang yang sudah kami laporkan," katanya. Yang kedua PT Capella Swastika Karya yang menyelenggarakan Miss Universe ini karena penyelenggaraanya menyelenggarakan karantina sehingga seharusnya seluruh agenda ini di bawah PT Capella. "Kemudian kami berharap 'project director' dalam pengembangan proses saksi dan korban," katanya. Mellisa juga telah menyerahkan bukti jadwal acara (rundown) telah diserahkan sejak awal bahwa dalam jadwal tidak pernah ada pengecekan tubuh (body checking). "Sehingga siapa orang yang memberikan ide untuk 'body checking', siapa orang yang memberikan akses bisa dilakukan 'body checking'. Siapa orang yang sebenarnya memang sudah berniat melakukan 'body checking' ini semuanya harus diusut segera," katanya. **(Ant/Has)-d**